

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

Fakultas Humaniora
Program Hukum Bisnis
Skripsi Sarjana Hukum
Semester Genap 2014/2015

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN STUDI KASUS: KOPERASI CITRA KARYA
GUNA PERSADA (KCKGP)**

Reggy Sesario 1501208544
Kelas: LA65

ABSTRAK

Indonesia memiliki berbagai jenis badan usaha berbadan hukum, salah satu diantaranya adalah koperasi. Dengan status badan hukum, koperasi dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana subjek hukum pada umumnya dan dimintakan tanggung jawab atas perbuatan hukumnya. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah kegiatan usaha koperasi dan sumber dana yang diperolehnya. Koperasi Citra Karya Guna Persada (KCKGP) adalah koperasi yang terafiliasi dengan PT Cipaganti. Koperasi ini memiliki konsep pengembalian modal dari mitra usaha dengan besaran bunga 1,5% - 2% per bulan sesuai modal yang ditanamkannya. Dalam perjalanannya koperasi ini gagal melakukan pembayaran dengan puncaknya pada bulan Maret 2014, sehingga pada akhirnya para mitra usaha melakukan upaya hukum untuk mendapatkan modalnya. Bertolak dari kasus tersebut maka disusunlah rumusan masalah tentang bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pengurus koperasi menurut UU Perkoperasian, serta apakah pertanggungjawaban pengurus KCKGP sudah sesuai dengan UU Perkoperasian. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan sifat penelitiannya deskriptif analitis. Simpulan dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pengurus menurut UU Perkoperasian melalui rapat anggota yang mekanismenya terdapat pada anggaran dasar. KCKGP tidak melakukan rapat anggota yang diatur UU Perkoperasian. Hal ini didukung dari adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh KCKGP. Oleh karenanya, mekanisme pertanggungjawaban dari KCKGP tidak sesuai.

Kata kunci: pertanggungjawaban, pengurus, koperasi, badan hukum, Undang-Undang Perkoperasian, Koperasi Citra Karya Guna Persada

**COOPERATIVE MANAGEMENT ACCOUNTABILITY
ACCORDING TO LAW NO. 25 YEAR 1992 CASE STUDY:
KOPERASI CITRA KARYA GUNA PERSADA (KCKGP)**

Reggy Sesario 1301208544
Class: LA65

ABSTRACT

Indonesia has various types of legal entity, one of them is cooperative. With that legal status, cooperatives can take legal actions as a subject of law in general and accountable legal action. Koperasi Citra Karya Guna Persada (KCKGP) is a cooperative that is affiliated with Cipaganti Company. This cooperative has the concept of providing assets of their business partners with 1,5% until 2% interests per month, according to the assets that have been invested. On its journey, this cooperative fails to make payments which happened in March 2014, so that the business partners make legal effort to get their assets. Based on that case, how is the cooperative management accountability mechanisms according to the Cooperative Law, as well as whether the accountability board of KCKGP is in conformity with the Cooperative Law. This research applied a normative-empirical research method and the characteristic in this writing is descriptive analysis. The conclusion from this research are, the accountability board according to the Cooperative Law is through the meeting of members whose mechanism contained in the articles of association. KCKGP didn't fulfil the meeting of members that is regulated by Cooperative Law. It is supported by the deviations committed by KCKGP. Therefore, the mechanism of accountability of KCKGP is not accordance to the Cooperative Law

Keywords: cooperative, management, accountability, Law No. 25 Year 1992, Koperasi Citra Karya Guna Persada.